

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya tujuan hidup setiap manusia adalah untuk mencapai kesejahteraan, meskipun manusia memaknai 'kesejahteraan' dengan perspektif yang berbeda-beda. Sebagian besar paham ekonomi memaknai kesejahteraan sebagai kesejahteraan material duniawi, sedangkan Islam memaknai 'kesejahteraan' dengan istilah *Falah* yang berarti kesejahteraan holistic dan seimbang antara dimensi material-spiritual, individual-sosial dan kesejahteraan di kehidupan duniawi dan di akhirat.<sup>3</sup> Manusia berlomba-lomba dengan berbagai macam cara untuk memenuhi semua kebutuhannya, oleh karena itu manusia saling membutuhkan, dan berinteraksi, hal itu menyebabkan saling menguntungkan satu sama lain (*Symbiosis Mutualisme*).

Semua manusia mempunyai kebutuhan yang serba aneka, dan kebutuhan ini harus dipenuhi, misalnya berupa kebutuhan akan makanan, pakaian, dan perumahan, dalam istilah populernya, kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan, mulai dari bentuk sederhana, sampai bentuk yang mewah, canggih, dan sangat mahal dengan segala perlengkapannya.<sup>4</sup> Akan tetapi dalam upaya mencapai kesejahteraannya, manusia menghadapi berbagai macam masalah, salah satunya kesenjangan antara sumberdaya yang ada dengan kebutuhan manusia.

---

<sup>3</sup> P3EI UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 42

<sup>4</sup> Nana Herdiana Abdurrahman, *Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 268.

Namun, adanya ketidakmerataan distribusi sumber daya, berbagai keterbatasan manusia, serta munculnya konflik antara tujuan duniawi dan ukhrawi menyebabkan terjadinya kelangkaan relatif.<sup>5</sup>

Dalam melaksanakan kegiatan ekonominya manusia memerlukan landasan hukum yang berguna untuk menjaga keteraturan hidup bermasyarakat. Islam mengatur masyarakat, termasuk dalam bidang perekonomian yang didalamnya terdapat transaksi jual beli, lewat hukum-hukum Allah yang menjamin keadilan secara pasti dan mempunyai manfaat didalamnya untuk mengatur kemasyarakatan. Seiring dengan perkembangan zaman yang menuntun manusia menuju era serba baru, maka diperlukan landasan hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman itu sendiri, sehingga hukum harus mampu menjawab segala masalah tersebut.

Sumber hukum yang mengatur landasan hukum ekonomi Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk mengetahui isi dalam kandungan hukum-hukum tersebut tidak cukup dengan adanya petunjuk, tetapi perlu cara khusus untuk mengetahui atau memahami isi dari petunjuk-petunjuk yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadits, oleh karena itu lahirlah kitab-kitab Tafsir Al-Quran dan Al-Hadits. Pemahaman terhadap isi dalam kandungan nash-nash yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadits tersebut dikenal dengan istilah *Fiqih*.

Dalam literatur fiqih terdapat berbagai macam aturan, salah satunya mengatur tentang masalah ekonomi. Para ulama dan ahli fiqih telah mengkodifikasikan aturan

---

<sup>5</sup> P3EI UII Yogyakarta, Ekonomi Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 43.

tentang masalah ekonomi ke dalam literatur *fiqih muamalah*. Aturan yang terdapat dalam literatur *fiqih muamalah* tersebut esensinya adalah bagaimana cara mengatur dan menentukan hukum terhadap kegiatan perekonomian manusia.

*Fiqih Muamalah* menekankan keharusan untuk menaati aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola dan mengembangkan *mal* (harta benda). Selanjutnya, dalam *fiqih muamalah* terdapat beberapa prinsip dasar, antara lain yaitu:

1. Asal dari kegiatan muamalah adalah boleh, sepanjang tidak ada dalil yang menunjukkan pelarangan atau pengharaman.
2. Tidak ada paksaan satu pihak kepada pihak lain (sukarela dan saling meridhoi).
3. Menghindari kemudharatan dan mengutamakan atau mendahulukan kemaslahatan.
4. Tidak melakukan perbuatan aniaya, dan tidak boleh dianiaya.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian di atas, ada aturan-aturan yang terkandung di dalam kaidah-kaidah *fiqih muamalah*. Diantaranya yaitu kaidah:

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحَلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

“*Hukum asal menetapkan syarat dalam mu’âmalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya)*”.<sup>7</sup>

Jual beli merupakan bagian penting dari kegiatan ekonomi, dan diperbolehkan dalam Islam sejak dahulu kala dalam berbagai bentuk, asalkan tidak membentur dalil-dalil pengharamannya. Kemudian kaidah mengenai penjual haruslah pemilik barang

<sup>6</sup> Ash-Shiddiqie, Hasbi, “*Pengantar Fiqih Muamalah*”, (Jakarta, Bulan Bintang, 1984), h. 11.

<sup>7</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Ed.1, cet.1, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 128-137.

yang akan dijual tersebut atau penjual menjadi wakil dari pemilik barang:

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

“Tidak seorang pun boleh melakukan tindakan hukum terhadap milik orang lain tanpa izin si pemilik harta”.<sup>8</sup>

Dalam hal ini seorang makelar atau perantara (*samsarah*) adalah orang yang bertindak sebagai penghubung antara 2 (dua) belah pihak yang berkepentingan.<sup>9</sup> Samsarah (*simsar*) adalah perantara perdagangan (orang yang menjualkan barang atau mencari pembeli), atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli.<sup>10</sup> Ulama penganut Hambali, Muhammad bin Abi al-Fath, dalam kitabnya, al-Mutall, telah menyatakan definisi tentang pemakelaran, yang dalam fikih dikenal dengan *Samsarah*, atau *dalal* sebagai sinonimnya, seraya menyatakan: “Jika (seorang) menunjukkan dalam transaksi jual-beli, dikatakan: *dalalta* dengan *masdar* yang difathahkan *dal-nya*, *dalalat(an)*, *dikasrahkan* *dal-nya*, *dilalat(an)*, *di dhammahkan* *dal-nya*, *dulalat(an)*, jika anda menunjukkan seorang pembeli kepada penjual, maka orang tersebut adalah *simsar* atau *dallal* (makelar) antara keduanya (pembeli dan penjual)”.<sup>11</sup> Perantara bertugas untuk menjembatani kepentingan antara pihak penjual dan pembeli. Namun pada prakteknya banyak berbagai bentuk kerja di

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 129.

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h. 618.

<sup>10</sup> M. Ali, Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (fiqh muamalah)*, ed. 1, cet. 2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 289.

<sup>11</sup> Abdullah Abdulkarim, *Pengertian Samsarah (Broker/Pemakelaran) dalam Hukum Islam* <http://ocessss.blogspot.com/2009/07/07/brokerpemakelaran-samsarah-dalam-islam-html>. Diakses 5 April 2018.

seorang perantara. Dari yang ingin untung sendiri dengan mengorbankan salah satu pihak dan tidak bertanggungjawab atas berbagai risiko yang terjadi.

Seorang perantara dapat menjual barang yang bukan miliknya kepada pembeli dengan menggunakan akad Murabahah. Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Murabahah adalah transaksi jual beli dimana perantara bertindak sebagai penjual dan dengan harga jual dari perantara adalah harga beli pemasok ditambah keuntungan dalam persentase tertentu sesuai dengan kesepakatan. Kepemilikan akan berpindah kepada pembeli segera setelah perjanjian jual beli ditandatangani dan pembeli akan membayar barang tersebut dengan tunai atau cicilan tetapi yang besarnya sesuai kesepakatan sampai dengan pelunasan.<sup>12</sup>

Berangkat dari hal tersebut, penulis tertarik untuk studi penelitian di penyedia bahan bangunan “Sinar Cimahi” Rancaekek Kab. Bandung. Penyedia ini menyediakan berbagai macam material bahan-bahan bangunan, akan tetapi tidak memiliki barang untuk dijual.

Studi kasus pertama: CV. De Haritz kontraktor pemegang tender yang membangun SMA Lab School UPI meminta untuk disediakan 150 batang besi dan 1 roll kawat beton kepada penyedia bahan bangunan “Sinar Cimahi” untuk dikirim ke SMA Lab School UPI Jl. Setiabudi no. 229 Bandung, tetapi penyedia bahan bangunan ini tidak memiliki barang-barang bahan bangunan apapun untuk dijual. Oleh karena

---

<sup>12</sup> <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/0805/21/hikmah-manajemen>. Diakses 2 Juli 2018.

itu, penyedia ini harus mencari barang-barang tersebut ke pemilik barang. Setelah barang yang diinginkan oleh pembeli didapatkan dengan bantuan penyedia ini kemudian penyedia ini menaikkan harga awal dari pemilik barang untuk mengambil keuntungan tanpa memberitahu modal dan keuntungannya kepada pembeli.<sup>13</sup> Harga dari pemilik barang yaitu Rp. 18.365.000,00 kemudian dinaikkan harganya sebesar Rp. 20.425.000,00 oleh penyedia tersebut.<sup>14</sup>

Studi kasus kedua: Bapak H. Uce sebagai mandor yang mengerjakan proyek SD Darul Hikam Jl. Tulip Raya No. 49 blok 3 perum Kencana Rancaekek meminta untuk disediakan 250 batang kayu borneo dengan ukuran 4/6x4m, kemudian penyedia ini membeli barang tersebut di perusahaan kayu “Sinar Alba” yang beralamat di Jl. Pesantren Kota Cimahi. Setelah barang didapat, lalu penyedia ini mengirimkan barang tersebut. Harga dari perusahaan kayu “Sinar Alba” yaitu Rp. 7.250.000,00 kemudian dinaikkan harganya sebesar Rp. 9.000.000,00 oleh penyedia tersebut.<sup>15</sup>

Studi kasus ketiga: Kontraktor CV. De Haritz meminta untuk disediakan 96 batang kayu jenis maranti dan 12 batang kayu jenis tembalun dengan masing-masing ukuran 4/6x4m untuk dikirim ke Calista Dago Residence Jl. Gandaria 2 Dago Kota Bandung. Kemudian prnyedia ini membeli kayu tersebut di perusahaan kayu “Sejati” Jl. Dr. Djunjunan No. 65 Kota Bandung. Setelah sejumlah kayu itu dibeli, lalu dikirim

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Dadang pemilik Penyedia “Sinar Cimahi” Rancaekek.

<sup>14</sup> Faktur Penjualan 01/05/2018. Penyedia “Sinar Cimahi” Rancaekek Kepada Bapak H. Olih SMA Lab School UPI Jl. Setiabudi no. 229 Bandung.

<sup>15</sup> Faktur Penjualan 06/08/2018. Penyedia “Sinar Cimahi” Rancaekek Kepada Bapak H. Uce SD Darul Hikam Jl. Tulip Raya No. 49 Blok 3 Perum Kencana Rancaekek Kab. Bandung.

ke alamat Calista Dago Residence. Harga dari perusahaan kayu “Sejati” yaitu Rp. 3.214.080,00 kemudian dinaikkan harganya sebesar Rp. 3.880.000,00 oleh penyedia tersebut.<sup>16</sup>

Jika dilihat dari ketiga kasus tersebut, ada dua kemungkinan transaksi yang dilakukan. Penyedia sebagai seorang perantara (*samsarah*) yang seharusnya seorang perantara (*simsar*) bertugas mempertemukan pembeli dan pemilik barang untuk membantu pembeli mendapatkan barangnya atau membantu penjual menjualkan barangnya, akad yang digunakan yaitu akad ijarah, yaitu suatu transaksi memanfaatkan jasa orang lain dengan imbalan. Atau penyedia ini sebagai penjual dengan akad *murabahah* tetapi dalam transaksi tersebut modal dan keuntungan tidak disebutkan dalam proses transaksi.

Dari pemaparan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI PASIF BAHAN BANGUNAN (Studi Kasus Penyedia Bahan Bangunan “Sinar Cimahi” Rancaekek Kabupaten Bandung)”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Praktek Jual Beli Pasif Bahan Bangunan (Studi Kasus Penyedia Bahan Bangunan “Sinar Cimahi” Rancaekek Kabupaten Bandung)?

---

<sup>16</sup> Faktur Penjualan 08/08/2018. Penyedia “Sinar Cimahi” Rancaekek Kepada Bapak H. Olih Calista Dago Residence Jl. Gandaria 2 Bandung.



2. Bagaimana Jual Beli Pasif Bahan Bangunan (Studi Kasus Penyedia Bahan Bangunan “Sinar Cimahi” Rancaekek Kabupaten Bandung) Menurut *Fiqh Al-Buyu’* dan Teori *Samsarah*?
3. Bagaimana Analisis Jual Beli Pasif Bahan Bangunan (Studi Kasus Penyedia Bahan Bangunan “Sinar Cimahi” Rancaekek Kabupaten Bandung) Menurut *Fiqh Al-Buyu’* dan Teori *Samsarah*?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Mengetahui Praktek Jual Beli Pasif Bahan Bangunan (Studi Kasus Penyedia Bahan Bangunan “Sinar Cimahi” Rancaekek Kabupaten Bandung).
- b. Untuk Mengetahui Jual Beli Pasif Bahan Bangunan (Studi Kasus Penyedia Bahan Bangunan “Sinar Cimahi” Rancaekek Kabupaten Bandung) Menurut *Fiqh Al-Buyu’* dan Teori *Samsarah*.
- c. Untuk Mengetahui Analisis Jual Beli Pasif Bahan Bangunan (Studi Kasus Penyedia Bahan Bangunan “Sinar Cimahi” Rancaekek Kabupaten Bandung) Menurut *Fiqh Al-Buyu’* dan Teori *Samsarah*.

#### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat agar menambah keilmuan bagi penulis dan dapat membandingkan antara teori dan relitas yang ada dalam penerapan praktek jual beli tanpa memiliki barang.



b. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk mendalami teori yang ada di perkuliahan dan menambah wawasan serta kemampuan berfikir mengenai penerapan praktek jual beli pasif bahan bangunan studi kasus penyedia bahan bangunan “Sinar Cimahi”.

c. Manfaat Implementasi

Penulis meneliti praktek jual beli pasif bahan bangunan pada penyedia bahan bangunan Sinar Cimahi, sehingga diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dan rujukan dalam penerapan praktek jual beli pasif bahan bangunan khususnya untuk penyedia bahan bangunan Sinar Cimahi dan pada umumnya untuk penyedia bahan bangunan yang lain.

**D. Kerangka Pemikiran**

Islam mengatur masyarakat, termasuk masalah ekonomi yang di dalamnya terdapat kegiatan transaksi jual beli, lewat hukum-hukum Allah yang menjamin manusia selamat di dunia dan akhirat. Ekonomi Islam berpijak pada landasan hukum yang pasti yang mempunyai manfaat untuk mengatur masalah kemasyarakatan, sehingga hukum harus mampu menjawab segenap masalah manusia khususnya di dalam kegiatan ekonomi. Sumber hukum yang diakui sebagai landasan hukum ekonomi Islam adalah sama dengan masalah-masalah lainnya yang berkaitan dengan sendi-sendi kehidupan manusia secara global yaitu Al Qur'an dan Al Hadits. Al Qur'an dan Al Hadits tersebut yang sampai kepada kita masih otentik dan orsinil. Orsinilitas dan otentisitas didukung oleh penggunaan bahasa aslinya, yakni bahasa Arab. Oleh

karena itu, untuk mengetahui kandungan hukum- hukumnya tersebut, tidak cukup hanya dengan adanya petunjuk, melainkan perlu cara khusus untuk mengetahui atau memahaminya dari petunjuk-petunjuk tersebut.

Jual beli menurut bahasa yaitu *al-Bai'*, *al-Tijarah*, dan *al-Mubadalah*. Sedangkan menurut istilah adalah sebagai berikut:

1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
2. Suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak.

Nash-nash al-Qur'an yang berkaitan dengan jual-beli diantaranya adalah surat An-Nisa (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>17</sup>

Menurut Imam Ibnu Katsir dalam kitab *Al Jam'u fi Tafsirul Qur'anil Karim*, dikatakan bahwa Ayat ini menerangkan hukum transaksi secara umum, lebih khusus kepada transaksi perdagangan, bisnis jual beli. Ayat-ayat sebelumnya menerangkan transaksi muamalah yang berhubungan dengan harta, seperti harta anak yatim, mahar, dan sebagainya. Dalam ayat ini Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan,

<sup>17</sup> Mr. Abdus Sami, dkk, *Al-Qur'an Ku Dengan Tajwid dan Blok Warna*, (Jakarta: Lautan Lestari, 2009, h. 69

memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari'at. Orang beriman boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling ridha, saling ikhlas dan berprinsip keadilan.

Kemudian dalam nash-nash hadits, salah satu dalil mengenai kegiatan transaksi jual-beli diantaranya adalah larangan Nabi Muhammad SAW terhadap praktek jual beli yang tidak memiliki barang dalam Hadits Hakim Ibnu Hizam yang menyatakan bahwa Nabi SAW bersabda:

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

*“Jangan engkau menjual barang yang tidak ada padamu”*.<sup>18</sup>

Dalam hadits ini, Nabi melarang jual beli yang objeknya tidak ada pada penjual pada saat waktu transaksi terjadi. Akan tetapi kemudian ditafsirkan bahwa yang menjadi larangan dalam hadits ini adalah bukan karena barang yang diperjual-belikan tidak ada pada saat transaksi jual beli terjadi, tetapi ditakutkan bahwa penjual tidak dapat memenuhi keinginan pembeli.

Selain Al-Quran dan Hadits, ada aturan aturan yang terkandung di dalam kaidah-kaidah fiqih muamalah. Diantaranya yaitu kaidah:

الْأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

<sup>18</sup> <https://yufidia.com/fikih-jual-beli-bag-1/>. Diakses Tanggal 1 Mei 2018.

*“Hukum asal menetapkan syarat dalam mu’âmalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya)”*.<sup>19</sup>

Menurut Al Fikri dalam kitabnya Fiqh Muamalah itu di bagi atas 2 bagian yaitu:

*“Al Muamalah al-Madiyah wa al-Adabiyah”*

### 1. Pengertian Muamalah Adabiyah/Al-Mu’amalah al-Adabiyah

Yaitu mu’amalah yang ditinjau dari segi cara tukar-menukar benda yang bersumber dari panca indera manusia, yang unsur penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban. seperti jujur, hasud, dengki, dendam, dan lain sebagainya atau dengan kata lain, dari aspek ini fiqh muamalah mengatur tentang batasan-batasan yang seharusnya dilakukan atau tidak oleh manusia terhadap benda.<sup>20</sup> Dalam bahasa yang lebih sederhana, Al-Muamalah al-Adabiyah aturan-aturan Alloh yang berkaitan dengan aktivitas manusia dalam hidup bermasyarakat yang ditinjau dari segi subjeknya, yaitu manusia sebagai penakluknya. Hal ini, berkisar pada keridhaan kedua belah pihak, ijab kabul, dusta, menipu, dan yang lainnya. Dengan demikian, al-muamalah al-adabiyah memberikan panduan bagi perilaku manusia untuk melakukan tindakan hukum terhadap sebuah benda. Maka dari perspektif ini, dalam pandangan fiqh muamalah semua perilaku manusia harus memenuhi prasyarat “etis-normatif” agar perilaku tersebut dipandang layak untuk dilakukan.<sup>21</sup>

### 2. Ruang lingkup Muamalah Adabiyah

<sup>19</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Ed.1, cet.1, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 128.

<sup>20</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h.4.

<sup>21</sup> Solikhul Hadi, *Fiqh Muamalah*, (Kudus: Nora Media Enterprise, 2011), h. 4.

Hal-hal yang termasuk ruang lingkup ***Muamalah Adabiyah*** adalah ijab dan kabul, saling meridai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta.

### 3. Pengertian Muamalah Maddiyah/ ***Al-Muamalah Al-Madiyah***

Yaitu mu'amalah yang mengkaji objek sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa mu'amalah al-Madiyah adalah mu'amalah bersifat kebendaan karena objek fiqh mu'amalah adalah benda yang halal, haram, dan syubhat untuk diperjualbelikan, benda-benda yang memadharatkan, benda-benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, dan beberapa segi lainnya. Al Muamalah al-Madiyah yang dimaksud Al-Fikri adalah aturan-aturan yang ditinjau dari segi objeknya. Dengan kata lain, al-muamalah al-Madiyah memberikan panduan kepada manusia tentang benda-benda yang layak atau tidak untuk dimiliki dan dilakukan tindakan hukum atasnya. Oleh karena itu, jual beli benda bagi muslim bukan sekedar memperoleh untung yang sebesar-besarnya, tetapi secara vertikal bertujuan untuk memperoleh ridha Allah dan secara horisontal bertujuan untuk memperoleh keuntungan sehingga benda-benda yang diperjualbelikan akan senantiasa dirujuk kepada aturan-aturan Allah. Maka, dari perspektif ini, dalam pandangan fiqh muamalah tidak semua benda (harta) boleh dimiliki atau dikuasai, meskipun mungkin benda tersebut memiliki nilai guna bagi manusia.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Solikhul Hadi, *op. cit*, h.5.

Kemudian syarat dan rukun jual beli itu ada tiga, yang pertama ialah penjual dan pembeli (*'Aqidain*). Yang dimaksud *'aqidain* adalah orang yang mengadakan akad (transaksi). Adapun syarat sah jual beli para ulama sepakat bahwa *'aqidain* haruslah seseorang yang telah sampai umur (*mumayyiz*).<sup>23</sup> Kemudian para pihak yang berakad ialah *Aqil* (berakal). Tidak sah jual beli dari atau kepada orang gila atau bodoh sebab mereka tidak ahli dalam mengendalikan hartanya. Kemudian syarat yang terakhir adalah *muhtar*, yaitu jual beli yang atas dasar kehendaknya sendiri tanpa adanya paksaan.

Yang kedua yaitu ijab Kabul (*'Aqd*), syarat sah ijab Kabul ialah sebagai berikut:

1. Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
2. Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan Kabul.
3. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam kepada pembeli yang tidak beragama Islam, sebab kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam.

Dan yang terakhir adalah objek yang halal (*Ma'qud Alaih*). Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad ialah sebagai berikut:

1. Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, dan yang lainnya.

---

<sup>23</sup> Abdul Rahman Al-Jaziri, *Fikih Empat Madzhab*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2000), h. 145.

2. Memberi manfaat menurut Syara', maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut Syara', seperti babi, kala, cicak, dan yang lainnya.
3. Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini padamu.
4. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan kujual motor ini pada tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan Syara'.
5. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi. Barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, tidak diketahui dengan pasti ikan tersebut sebab dalam kolam tersebut ikan-ikan yang sama.
6. Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak se-izin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
7. Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.<sup>24</sup>

Jual beli merupakan bagian penting dari kegiatan ekonomi, dan diperbolehkan dalam Islam sejak dahulu kala dalam berbagai bentuk, asalkan tidak membentur dalil-

---

<sup>24</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 68-72.



dalil pengharamannya. Kemudian kaidah mengenai penjual haruslah pemilik barang yang akan dijual tersebut atau penjual menjadi wakil dari pemilik barang:

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

“Tidak seorang pun boleh melakukan tindakan hukum terhadap milik orang lain tanpa izin si pemilik harta”.<sup>25</sup>

Islam mensyariatkan jual beli dengan wakil karena manusia membutuhkannya. Manusia membutuhkan wakil atau pendelegasian mandat kepada orang lain untuk menekuni segala urusannya.<sup>26</sup> Yaitu orang yang menjalankan usaha jasanya sebagai perantara, yakni perantara antara penjual dan pembeli untuk melaksanakan jual beli. Dalam kitab *Tajul-Arus* disebutkan bahwa yang dimaksud perantara (*samsarah*): “yaitu orang yang disebut sebagai penunjuk: ia yang menunjukkan pembeli mengenai komoditi (barang), dan menunjukkan kepada penjual patokan harga.”<sup>27</sup> Perantara bertugas untuk menjembatani kepentingan antara pihak penjual dan pembeli. Namun pada prakteknya banyak berbagai bentuk kerja di seorang perantara. Dari yang ingin untung sendiri dengan mengorbankan salah satu pihak dan tidak bertanggungjawab atas berbagai risiko yang terjadi.

Seorang perantara dapat menjual barang yang bukan miliknya kepada pembeli dengan menggunakan akad Murabahah. Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan

<sup>25</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Ed.1, cet.1, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 129

<sup>26</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung: PT. Al Maarif, 1987), h. 55.

<sup>27</sup> Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, cet ke-1, (Yogyakarta: Maktabah Al Hanifah, 2009), h. 83.

pembeli. Murabahah adalah transaksi jual beli dimana perantara bertindak sebagai penjual dan dengan harga jual dari perantara adalah harga beli pemasok ditambah keuntungan dalam persentase tertentu sesuai dengan kesepakatan. Kepemilikan akan berpindah kepada pembeli segera setelah perjanjian jual beli ditandatangani dan pembeli akan membayar barang tersebut dengan tunai atau cicilan tetapi yang besarnya sesuai kesepakatan sampai dengan pelunasan.<sup>28</sup>

Dari pengertian murabahah yang telah dikemukakan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga asal dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli baik secara tunai maupun kredit. Tetapi dengan syarat sebagai berikut:

- a) Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah.
- b) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- c) Kontrak harus bebas dari riba.
- d) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- e) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang. Jika syarat pada poin a), d), dan e) tidak terpenuhi, maka pembeli memiliki pilihan:
  - a) Melanjutkan pembelian seperti apa adanya.
  - b) Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual.

---

<sup>28</sup> <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/0805/21/hikmah/manajemen>. Diakses 2 Agustus 2018.

- c) Membatalkan kontrak Jual beli secara murabahah tersebut hanya untuk barang tau produk yang telah dimiliki oleh penjual pada waktu negosiasi dan pada waktu kontrak.<sup>29</sup>

Berangkat dari hal tersebut, penulis tertarik untuk studi penelitian di penyedia bahan bangunan “Sinar Cimahi” Rancaekek.

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan proses dari kegiatan mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis suatu data dalam sebuah peristiwa, untuk memperoleh suatu hasil kajian. Metode yang digunakan dalam penyusunan ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*)<sup>30</sup> yang dilaksanakan di tempat observasi yaitu penyedia bahan bangunan “Sinar Cimahi” Rancaekek. Jenis penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif, yaitu mendeskripsikan suatu proses kegiatan yang berhubungan dengan keilmuan berdasarkan yang terjadi di lapangan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk menemukan kekurangan dan kelemahan antara teori dan praktik sehingga dapat ditemukan upaya penyempurnaannya.

### **2. Sumber Data**

---

<sup>29</sup> Muhammad. Syafi’I Antonio, *Bank Syari’ah Suatu Pengenalan Umum* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), h. 146.

<sup>30</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 1999, h. 21.

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.<sup>31</sup> Penulis menggunakan dua sumber data dalam penelitian ini, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber asli atau sumber pertama yang secara umum kita sebut sebagai narasumber.<sup>32</sup> Wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang sudah diproses oleh pihak tertentu sehingga data tersebut sudah tersedia saat kita memerlukan.<sup>33</sup> Diperoleh dari dokumentasi, arsip, dan data-data lain yang bersangkutan dengan judul penelitian.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang di yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara dan dokumentasi. Kedua metode ini digunakan agar mendapatkan data yang tepat dan akurat.

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan).<sup>34</sup> Dalam hal ini, metode

<sup>31</sup> Kasiram, *Metode Penelitian*, Cet Ke-1, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 113.

<sup>32</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Riset Skripsi*, (Jakarta: Elex Media, 2012), h. 37.

<sup>33</sup> *Ibid*, h. 33.

<sup>34</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 317.

pengumpulan data yaitu dilaksanakan melalui cara wawancara dengan para pihak yang terlibat dalam judul penelitian.

b. Dokumentasi

Dalam metode ini sumber data yang dapat diperoleh berupa catatan transaksi, atau dokumen-dokumen yang tersedia dan berkaitan dengan objek penelitian.<sup>35</sup>

#### 4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, observasi, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>36</sup>

Setelah data terkumpul, selanjutnya data yang didapatkan diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif yaitu sebuah metode analisis yang menekankan pada pemberian gambaran baru terhadap data yang telah terkumpul.<sup>37</sup> Tujuan dari metode tersebut yaitu untuk memberi deskripsi terhadap objek yang diteliti.<sup>38</sup> Dalam penelitian ini penulis menggambarkan pelaksanaan jual beli bahan bangunan tanpa memiliki barang studi kasus penyedia bahan bangunan “Sinar Cimahi” Rancaekek.<sup>39</sup>

<sup>35</sup> Sanapia Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), h. 25.

<sup>36</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 89.

<sup>37</sup> S. Margono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 165.

<sup>38</sup> Robert Bohdan dan Steven J. Taylor, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif. Suatu pendekatan Fenomologis Terhadap Ilmu-Ilmu Sosial*, (Surabaya: Usaha Offset Printing, 1992), h. 22.

<sup>39</sup> Sudarwan Danin, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), h. 41.

Proses analisis data dalam metode pendekatan penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, yaitu terhadap data hasil studi terdahulu yang digunakan untuk menentukan focus penelitian yang masih bersifat sementara. Selama berada di lapangan, langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam analisis data yaitu data *reduction* (reduksi data), data *display* (penyajian data), dan *conclusion* (penarikan kesimpulan). Setelah selesai penelitian di lapangan.<sup>40</sup>



---

<sup>40</sup> Sugiyono, *op. cit*, h. 336-345.